BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat luas adalah di bidang komunikasi. Karena kemajuan teknologi ini, banyak orang dapat menggunakannya dalam bisnis termasuk jasa keuangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aplikasi non perbankan yang tersedia di internet yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang.

Sistem pada Aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer¹lending*”, Hadirnya sistem pinjaman *peer-to-peer* di Indonesia tentunya dapat memberikan efek positif yaitu sebagian penduduk yang tinggal di pelosok atau daerah terpencil dapat dengan mudah meminjam uang. Dengan pinjaman online ini Anda dapat dengan cepat meminjam uang. Pinjaman online adalah layanan peminjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan hingga persetujuan dan pencairan dana secara online atau melalui konfirmasi *Short Message Service* (SMS) dan telepon.

Bentuk kejahatan semakin bervariasi dengan dukungan perkembangan teknologi, maka teknologi juga dimanfaatkan untuk penipuan sebagai bentuk

¹ Alfhica Rezita Sari, 2018, ”Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis Peer to peer Lending Di Indonesia”

kejahatan yang diakibatkan oleh kejahatan yang disebabkan oleh teknologi tersebut. Fitur yang berkembang adalah Internet. Perkembangan lahirnya internet diawali dengan telematika. Telematika ditemukan pada tahun 1976. Dalam bahasa Prancis, istilah telematika berasal dari kata *telematique*, yang menggambarkan perpaduan antara sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.² Teknologi informasi, di sisi lain, hanya menjelaskan perkembangan perangkat pengolah data. Media dan teknologi elektronik dapat dijadikan pionir yang dapat menghubungkan seluruh sistem dunia dalam hal keuangan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga perkembangan ini dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.³

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi yang sering disebut sebagai *financial technology* atau *fintech*. *Fintech* membuat pembayaran lebih cepat tanpa perlu pertemuan tatap muka. Perkembangan teknologi saat ini dapat menjamin perkembangan di segala bidang kehidupan masyarakat. Memfasilitasi semua yang ingin Anda lakukan dan membawa kehidupan masyarakat yang semula tradisional ke dalam modernitas atau modernisasi.

Perkembangan fintech ini meliputi beberapa industri antara lain origination fee, lending, financial planning (personal finance), retail investment finance (crowdfunding), rewards, financial research dan lain-lain.

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, h.3

³ *ibid*

Perkembangan saat ini patut dimanfaatkan untuk merasakan keunggulan fintech yang mudah dan praktis untuk digunakan.⁴

Pinjaman online hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang di pelopori oleh *Fintech {Financial Technology}*. Kemudian Bank dan Lembaga keuangan juga ikut menawarkan berbagai produk pinjaman dengan proses yang cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur pelayanan pinjaman dana melalui teknologi informasi. pinjaman online merupakan pilihan finansial banyak diminati masyarakat Indonesia saat ini karena proses pengajuannya yang cepat, syarat mudah praktis.

Masyarakat tidak harus lagi datang ke Bank untuk mengajukan pinjaman langsung, proses peminjaman cukup di akses melalui *Smartphone*, seperti *Apple store {IOS}* atau *Google play store {Android}* maupun laptop yang terkoneksi dengan internet. Dengan prosesnya yang mudah dan cepat namun ternyata dibalik proses yang mudah dan cepat, tentu memiliki konsekuensi dan resiko yang akan diterima oleh nasabah jika mereka melanggar kewajiban mereka.

Perkembangan *Fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dalam penagihan berbagai kasus pelanggaran perusahaan *Fintech* di media massa bentuk pelanggaran perusahaan *Fintech* ini pun berbagai jenisnya. Dari

⁴ <https://repository.unair.ac.id/94248/4/4%20BAB%201%20pendahuluan>

penagihan *intimidatif* penyebaran data pribadi yang diatur pada Undang – Undang Informasi Technology Elektronik (Pasal 32 jo pasal 48 UU ITE).⁵

Perkembangan *Fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dalam penagihan berbagai kasus pelanggaran perusahaan *Fintech* di media massa bentuk pelanggaran perusahaan *Fintech* ini pun berbagai jenisnya. Dari penagihan *intimidatif* penyebaran data pribadi yang diatur pada Undang – Undang Informasi Technology Elektronik (Pasal 32 jo pasal 48 UU ITE).⁶

Perlindungan data nasabah dan tanggung jawab pelaku usaha *Fintech* terhadap nasabah telah di atur dalam undang–undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen/nasabah. menurut peraturan menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1), menyatakan “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat di jaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.” pada Pasal 1 Ayat (2) telah diterangkan bahwa data pribadi merupakan keterangan nyata milik masing – masing individu yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pemerintah juga telah membuat regulasi yang mengatur tentang privasi atau data pribadi melalui regulasi yaitu Undang–Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang– Undang Nomor 19 Tahun 2016,tertuang dalam Pasal 26 Ayat 1 menerangkan bahwa pemanfaatan via elektronik yang berkaitan dengan

⁵Rizka noor Hasela,SH https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/perlindungan-nasabah-pinjaman-online

⁶bid

data pribadi harus berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan, Pasal 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyatakan data pribadi adalah data perorangan yang disimpan, di jaga kerahasiannya.⁷

Perlindungan data pribadi terdapat dalam Undang–Undang Perlindungan data pribadi (UU PDP) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi Undang–Undang ini merupakan produk hukum terbaru yang disahkan pada 17 Oktober 2022. Dengan ditetapkan Undang–Undang tentang perlindungan data pribadi diharapkan perlindungan data masyarakat dapat terjamin dan dilindungi bagi oknum yang selalu memanfaatkan data pribadi masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, dan diadili melalui penyalahgunaan media internet. Di Indonesia, masalah yang terjadi khususnya di media sosial juga bisa dikatakan sangat banyak. Dengan banyaknya penggunaan media sosial bagi kalangan masyarakat tentunya mulai mendapatkan pengaruh dalam penggunaannya. Oleh karenanya,

⁷Shrishti Wadhwa <https://perlindungan/-hukum-bagi-data-pribadi-konsumen-peer-to-peer-lending>

DIKTUM;Jurnal syariah dan hukum-perlindungan- hukum terhadap-data-pribadi-dalam-transaksi-ecomarce

tidaklah mengherankan apabila banyak bermunculan kasus-kasus yang berhubungan dengan dunia maya tersebut.⁸

Masyarakat hukum terus berkembang, dan ini juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum itu sendiri, yang selalu dinamis dan tidak pernah stagnan. Hukumi selalu bereaksi terhadap perubahan sosial, hal ini juga berlaku pada masyarakat Indonesia. Perkembangan yang terjadi juga tidak terlepas dari dunia elektronik yang memaksa masyarakat untuk mengikutinya. Selain itu, jangan lari dari masalah utang. Umumnya, kasus yang melibatkan hutang bisnis termasuk dalam lingkup hukum perdata. Seiring waktu, arah kasus berubah ketika debitur menganggap pengiriman atau penagihan tidak tepat.

Hukum pidana adalah norma, hukum yang memberi masyarakat aturan hukum, dan dalam konteks naturlijkperson dan badan hukum sebagai penjamin pembatasan, tindakan ilegal dan kehidupan masyarakat. Fitnah dan reputasi baik dilindungi, baik dalam kehidupan nyata maupun di media sosial. Tidak mengherankan, ini telah terjadi pada segelintir orang baru-baru ini. Fitnah dikenal sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Fitnah, nama baik, klasifikasi menjadi penghinaan atau bahkan fitnah, tanpa dasar yang benar dan tanpa dasar yang kokoh.

⁸ Hetty Hassanah, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.8, No. 2, November 2016, hlm. 232.

Dalam hukum pidana, penghinaan ditemukan dalam bab XVI tentang penghinaan. Dalam KUHP, hal ini diatur sehubungan dengan delik yang diatur dalam pasal 310-321 KUHP. Baik penghinaan, yang dilakukan secara lisan atau tertulis, dengan penghinaan, fitnah atau penghinaan dengan cara memfitnah, diatur dalam pasal 310 – 321 KHUP.⁹ Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik juga terdapat dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2016.

Ada bagian dari organisasi hukum yang merasa bahwa kepentingan atau tindakannya dicemarkan atau dilukai dan hukum dianggap efektif dalam melaporkan tindakan tersebut. Karena itu, akhir-akhir ini banyak kasus pencemaran nama baik, terutama di jejaring sosial. Beberapa istilah telah diperkenalkan atau digunakan dalam undang-undang dan peraturan untuk menunjukkan pencemaran nama baik dan pelanggaran pencemaran nama baik. Namun, pencemaran nama baik melalui media sosial diatur tersendiri dalam UU ITE karena dampak dari perilaku tersebut dibandingkan dengan pencemaran biasa dapat dilihat di seluruh dunia. Jika disiarkan melalui media sosial, maka akan terasa di seluruh dunia dalam hitungan detik. Oleh karena itu, efek yang dihasilkan bisa sangat kompleks dan rumit .

⁹ Wildan Muchladun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol.3, No.6, 2015, hlm. 2.

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat perusahaan *Fintech* yang melakukan pelanggaran dengan penyebaran data pribadi nasabah sehingga penulis perlu meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan hukum dan sanksi hukum terhadap data nasabah yang sudah disebar oleh perusahaan *Fintech*.

Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa Kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Ujung Batu, di Kecamatan Ujung Batu ini memiliki empat Desa diantaranya terdapat Desa Pematang Tebih, Desa ini juga memiliki lima ratus lima puluh tiga (553) penduduk.

Di Desa Pematang Tebih terdapat sebuah kasus pelanggaran penyebaran data pribadi yang di lakukan oleh *Fintech* terhadap data pribadi nasabah terjadi dalam kasus aplikasi pinjaman online. Salah seorang warga desa Pematang Tebih yaitu, inisial (HL) laki-laki berumur 25 tahun selaku korban penyebaran data pribadi menceritakan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh salah satu pihak aplikasi pinjaman online tanpa pemberitahuan dan tanpa seizin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi dilakukan dengan mengakses seluruh data kontak nomor telpon yang ada di *smartphonenya* dengan mengirim pesan ke seluruh kontak yang ada di telpon peminjam, dan menelpon seluruh kontak.

Pada kasus (HL), aplikasi pinjaman online telah melakukan penyebaran data pribadi milik korban dengan cara mengirim pesan ke seluruh nomor telfon

¹⁰ Kementrian UU_Nomor_27_Tahun_2022<https://jdih.maritim.go.id/uu-no-272022-Pelindungan-data-pribadi>. Hasil wawancara Dari korban penyebaran data pribadi nasabah

yang ada pada *smartphone* korban yang mana isi dari pesan tersebut berupa peringatan agar (HL) segera membayar tagihan yang sudah lewat dari tanggal tenor yang sudah di tentukan, dan juga menyebar isi galeri dari *smartphone* milik Nasabah Pinjaman Online.

Tabel I

Jumlah Kasus Pinjaman di Desa Pematang Tebih

NO	Nama	Aplikask pinjaman online	Modus Operandi
1.	HL	KREDIVO	Isi dari <i>smartphone</i> diretas dan disebar luaskan
2.	DU	JULO	Terror berupa pesan dan telfon
3.	BS	KTA KILAT	Ancama akan disebar luaskan data pribadi
4.	IW	MAUCASH	Terror dan ancaman penyebaran data diri

Sumber : olahan penulis 25 juli 2023

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN ONLINE”**.

1.2. Batasan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis membatasi fokus masalah dalam penelitian ini, yang mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap perlindungan data nasabah pinjaman online, terutama di desa pematang tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini berguna agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah, tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Pada Latar Belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan dengan permasalahan yang menjadikan titik temu pertanyaan tersebut:

1. Apakah Modus Operandi Penyebaran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Aplikasi Pinjaman Online Termasuk Dalam Pelanggaran Hukum Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa akibat Hukum Terhadap Layanan Pinjaman Online yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Nasabah di Desa Pematang Tebih?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap layanan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Menurut Undang-undang ITE.
2. Untuk Mengetahui Apa saja akibat Hukum Terhadap layanan Aplikasi Pinjaman Online yang Melakukan penyebaran Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Aplikasi Pinjaman Online.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini adalah :

Manfaat Bagi Masyarakat :

1. Penelitian ini diharapkan dapat Menambah wawasan dan Pengetahuan mengenai Perlindungan Penyebaran Data Pribadi Pinjaman Online berdasarkan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Serta juga diharapkn sebagai pengembangan ilmu Pengetahuan yang dipelajari di bangku perkuliahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai perlindungan data nasabah pinjaman online yang dapat berkontribusi terhadap pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum perdata.
3. Sebagai Pemberian Informasi kepada masyarakat tentang perlindungan data nasabah pinjaman online.

4. Terdeteksinya masalah atau faktor – faktor penyebab masalah yang di hadapi oleh masyarakat yang datanya disebarakan oleh aplikasi pinjaman online.

5.

Manfaat Bagi Peneliti :

1. Dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang Ilmu Hukum perdata sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat nantinya.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat Membantu pihak – pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dalam hal ini negara berkewajiban melindungi setiap warga negara dari segi hukum untuk menjamin kelangsungan hidup warga negaranya demi keselamatan dan sejahtera.

Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah upaya atau tindakan yang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan tertentu ketika tindakan tersebut menyimpang dari hukum, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban warga negara seluruh masyarakat.¹¹

Sadjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia (HAM) yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan suku, ras dan budaya, agar semua warga negara dapat menikmati semua hak hukumnya.¹²

¹¹Setiono, *Rule of law* (supermasi Hukum) Surakarta, Magister ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal 3.

¹² Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : P. T. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53.

Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, perlindungan hukum terhadap martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia karena badan hukum berdasarkan amanat hukum atau seperangkat aturan dan peraturan yang dapat melindungi sesuatu yang lain. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Perlindungan hukum *preventif*

Perlindungan dari pemerintah, yang dirancang untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, tertuang dalam peraturan hukum yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dan memberikan arahan atau batasan dalam pemenuhan kewajiban. .

2. Perlindungan *represif*

Perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan ketika timbul sengketa atau terjadi pelanggaran. Tindakan yang bersifat mengekang, menekan, menahan dan menindas dan menyembuhkan.¹³

Kepastian hukum mempunyai dua arti yaitu pertama dengan adanya aturan umum memungkinkan individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, berupa perlindungan hukum bagi individu dihadapan penguasa negara, karena dari aturan umum dapat diketahui apa yang dapat diperintahkan. atau negara bertindak terhadap individu tersebut.

¹³ Sajipto Raharjo, "perlindungan Hukum", melalui <https://www.suduthukum.com>.diakses

Kepastian bukan hanya berupa pasal dalam undang – undang, melainkan adanya konsistensi dalam putusan hakim antara hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan.¹⁴

Hukum bertindak sebagai pelindung kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan rakyat, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Penegakan hukum dapat berjalan normal, damai dan tertib. Pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan.

Peraturan perundang-undangan, baik berupa peraturan maupun undang-undang tidak tertulis, memuat aturan-aturan umum yang menjadi pedoman tingkah laku individu dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan membentuk batas untuk individu. Adanya aturan menciptakan kepastian hukum.¹⁵

Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak dan sebagainya. perlindungan hukum di Indonesia secara

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Asas Kepastian Hukum", melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com>

¹⁵ Wildan Areza, "Macam- Macam Perlindungan Hukum", melalui <https://kantor.hukum-ss.com>

perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di atur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, berupa ganti rugi.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang di perbuatnya. Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁶

Perlindungan hukum timbul dari ketentuan dan segala peraturan yang dikeluarkan oleh masyarakat, yang mengatur hubungan tingkah laku antar masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat. hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum, perlindungan hukum merupakan contoh bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga mencakup pentingnya perlindungan yang diberikan kepada yang lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala upaya negara untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi warga negaranya .

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum>

¹⁷ <https://suduthukum.com/2016/11/Tujuan-perindungan-hukumhTml>

Penegak hukum adalah proses pengaplikasian norma- norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegak hukum mengacu pada upaya penegak hukum untuk memastikan jalannya hukum, dalam arti luas, penegak hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Tujuan penegakan hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁸ Fungsi perlindungan dan penegakan hukum, yaitu :

1. Menegakkan supremasi hukum
2. Mewujudkan keadilan
3. Mewujudkan perdamaian

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak menegakkan hukum dengan cara menghalangi, menemukan memulihkan atau menghukum orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum. Mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat dan yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah dan menemukan aktivitas kriminal.¹⁹

Penegakan hukum adalah suatu proses usaha untuk meneguhkan atau menuntun norma-norma hukum yang asli dari tingkah laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. yang

¹⁸ <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/17/080000269/pengertian-perindungan-dan-penegakan-hukum?page=all>

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum

menjalankan aturan normatif atau Melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti mengikuti dan menaati aturan hukum.

Sejauh menyangkut subjek, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai pengeluaran mesin penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu. dari segi subyeknya, mencakup makna yang luas dan sempit yang mencakup pada nilai- nilai keadilan didalanya suara aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tegasnya, tuntutan pidana hanya menyangkut pelaksanaan perintah formal dan tertulis.²⁰

Soerjono Soekanto berpendapat, ada lima faktor yang berpengaruh pada proses penegakan hukum dalam memberikan perlindungan.

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum, yakni pihak yang membentuk atau yang menerapkan hukum
3. Sarana dan prasarana yang mendukung Masyarakat lingkungan tempat hukum diterapkan
4. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta.²¹

Sanksi terhadap pelanggaran banyak ragamnya sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lainnya.tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

²⁰ [http: //pkbh.uad.ac.id/penegak-hukum/](http://pkbh.uad.ac.id/penegak-hukum/)

²¹ <http://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-perlindungan-dan-penegakanhukum-tt6230577eia784/>

Sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembaga – lembaga peradilan, sanksi social diberikan oleh masyarakat berikut ini sanksi dari norma – norma yang berlaku di masyarakat.²²

1. Sanksi agama
2. Sanksi kesusilaan
3. Sanksi kesopanan
4. Sanksi hukum

2.1.2. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan.

Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi.

Hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dan semua kehidupan manusia dibatasi oleh hukum, sehingga mengacu pada sistem terpenting bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan berbagai kekuasaan penegakan hukum.

²²<https://www.studocu.com/id/document/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia/>

Dengan diterapkan hukum yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia wajib menaati hukum yang ada. Baik itu pidana, perdata dan lainnya. Bagi orang yang melanggar hukum mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum akan diadili dengan cara hukum pidana. Hukum pidana, sebagai unsur tersendiri dari hukum publik, merupakan salah satu perangkat hukum yang keberadaannya begitu urgen sejak dahulu kala.

Hukum pidana mencakup sejumlah aspek, termasuk :

1. Tindak pidana

Menentukan dan mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Contohnya, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penipuan, dan sebagainya.

2. Subyek hukum pidana

Mengatur siapa yang dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan (tersangka, terdakwa) dan bagaimana tanggung jawab pidana dapat dikenakan pada mereka.

3. Sanksi hukum pidana

Merupakan bagian penting dari hukum pidana yang menentukan jenis dan besaran hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Sanksi pidana dapat berupa denda, pidana penjara, hukuman mati (di beberapa yurisdiksi), atau hukuman lainnya.

4. Proses peradilan pidana

engatur proses pengadilan dalam menangani kasus-kasus pidana, termasuk penyelidikan, penangkapan, penuntutan, persidangan, dan putusan.

5. Prinsip-prinsip hukum pidana

Membahas prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar hukum pidana, seperti asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), asas kesalahan (*actus reus* dan *mens rea*), asas proporsionalitas, dan sebagainya.

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan bagi warga negara dari tindakan kriminal. Perlu dicatat bahwa sistem hukum pidana dapat bervariasi antara negara-negara dan wilayah-wilayah tertentu, karena aturan hukum pidana biasanya ditetapkan oleh masing-masing negara sesuai dengan sistem hukum dan kebudayaan yang berlaku di negara tersebut.

Keberadaan undang-undang ini sangat penting karena merupakan “badan moral” yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindakan kriminal, menjaga stabilitas nasional, dan (serta) merehabilitasi para penjahat. Undang-undang ini berkembang sebagai jawaban atas tuntutan aktivitas kriminal yang ada di setiap zaman. Oleh karena itu untuk mengetahui apa itu hukum pidana secara lanjut, berikut penjelasannya:

menurut para ahli hukum pidana:

1. Mezger: Hukum pidana merupakan hukum terikat dengan perbuatan yang memiliki unsur tertentu dan menimbulkan dampak pidana.²³
2. PS: hukum pidana adalah larangan atau perintah lengkap yang dalam keadaan tertentu mengancam negara dengan keji, yaitu kejahatan jika tidak dipatuhi, dan menjadi dasar pengenaan dan penerapan proses pidana.
3. Van Hamel: Hukum pidana adalah kewajiban untuk menegakkan hukum, yaitu seluruh dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang tidak sah dan menimbulkan penderitaan (penderitaan) bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.²⁴

Jenis-jenis hukum pidana:

1. Hukum pidana substantif meliputi peraturan-peraturan yang menetapkan dan merumuskan tindak pidana, peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat terjadinya suatu kejahatan, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana pokok diatur dalam KUHP.

²³ <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/>

²⁴ <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/modul-hukum-pidana.>

2. Hukum pidana mengatur bagaimana Negara dapat menggunakan haknya untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan hadiah. Hukum pidana formil disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Hukum pidana Umum memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas (UULL), dll.
4. Hukum pidana Khusus memuat ketentuan KUHP yang menyimpang dari hukum pidana umum mengenai golongan, golongan dengan jenis perbuatan tertentu. Sebagai contoh:
 - 1) Hukum pidana militer
 - 2) Hukum pidana perpajakan
 - 3) Hukum pidana ekonomi
 - 4) Hukum pidana korupsi

Asas-asas Hukum Pidana²⁵:

1. Asas legalitas

Suatu tindak pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan asas legalitas, ketentuan pidana dari undang-undang yang ada sebelum tindak pidana itu dilakukan (Pasal 1 (1) KUHP). Jika undang-undang

²⁵ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta – Rineka Cipta, Hlm. 23;

tersebut direvisi setelah kejahatan dilakukan, maka berlaku ketentuan yang memudahkan untuk menghukum tersangka (KUHP, Pasal 1, Ayat 2).

2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan:

Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana harus dilakukan apabila ia mempunyai unsur kesalahan.

3. Asas territorial:

Ketentuan KUHP berlaku untuk semua perkara pidana yang terjadi di daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 2 KUHP)

4. Asas nasionalitas aktif:

ketentuan KUHP berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun (Pasal 5 KUHP).

5. Asas nasionalitas pasif

Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua kejahatan yang merugikan kepentingan nasional (Pasal 4 KUHP).

Sistem pidana yang terdapat dalam pasal 10 tentang pidana pokok dan pidana sekunder menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah²⁶:

²⁶ *Ibid.* Hlm. 24;

A. Hukuman Pokok Atau Utama

- 1) Hukuman Mati
- 2) Penjara
- 3) Denda

B. Hukuman Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

2.2. Tinjauan Umum Modus Operandi

2.2.1. Pengertian Modus Operandi

Modus operandi adalah istilah Latin yang digunakan di kalangan berbahasa Inggris untuk menggambarkan cara operasi kebiasaan individu atau kelompok,. Istilah ini terutama digunakan saat membahas perilaku kriminal , tetapi tidak secara eksklusif diucapkan dalam konteks ini. Modus operandi juga dapat didefinisikan sebagai metode operasi tertentu.

Misalnya, ahli strategi militer mengacu pada modus operandi musuh saat memprediksi langkah ancaman berikutnya dalam konflik bersenjata. Bersinonim dengan istilah "mode operasi", modus operandi secara rutin disingkat menjadi inisial "MO", baik dalam penggunaan tertulis maupun lisan.

Sekelompok orang atau masyarakat yang berbeda sering menunjukkan pola pikir atau pola perilaku yang spesifik untuk budaya tersebut. MO ini dapat sangat bervariasi melintasi batas budaya atau geografis. Selain itu, MO bersifat cair, karena dapat berubah ketika nilai berkembang atau ketika kerusakan demografis bergeser dalam masyarakat tertentu.²⁷

Individu juga sering berperilaku dengan cara yang sama seperti sebelumnya, menunjukkan pola yang sama sepanjang hidup mereka. Mempelajari individu dan keputusan mereka dari waktu ke waktu dapat mengarahkan seseorang untuk memprediksi langkah individu atau bisnis selanjutnya.

Istilah modus operandi ialah cara atau teknik penjahat dapat melakukan kejahatan agar perbuatannya dapat berjalan dan kejahatan dapat terwujud. Cara-cara yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan dapat terjadi karena faktor-faktor penyebab sehingga aksi kejahatan tersebut terjadi.²⁸

²⁷ Artanti, U. D. (2020). *Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

²⁸ *ibid*

2.2.2. Modus Operandi Penyebaran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Pijaman Online

Modus operandi penyebaran data pribadi merupakan salah satu cara khusus atau pola yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan akses, mencuri, dan menyebar luaskan informasi pribadi seseorang. Hal ini merupakan suatu Tindakan yang melawan hukum yang dapat menyebabkan berbagai masalah keamanan privasi individu yang terkena dampaknya.

Beberapa contoh modus operandi penyebaran informasi pribadi antara lain:

1. *Phising*

Pelaku mencoba mengelabui seseorang agar memberikan informasi pribadi mereka, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau nomor rekening bank, melalui *email* pesan teks, atau situs *web* palsu yang meniru institusi terpercaya.

2. Pencurian data

Pelaku mencoba untuk meretas atau mencuri data dari basis data, situs web, atau perangkat fisik, seperti computer atau ponsel, untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi pengguna.

3. *Malwer dan ransomware*

Penggunaan perangkat lunak berbahaya untuk menyusup ke perangkat seseorang, mencuri data pribadi, atau mengenkripsi data dan menuntut tebusan agar data tersebut dapat dipulihkan.

4. Pelanggaran keamanan perusahaan

Penyusup mencari cara masuk ke jaringan perusahaan atau organisasi untuk mencuri informasi pribadi karyawan atau pelanggan.

5. Penipuan melalui media social

Pelaku menggunakan media sosial untuk mencuri informasi pribadi dan memanfaatkannya dalam tindakan penipuan.

6. Pembocoran data

Pihak internal atau pihak ketiga yang tidak bermaksud baik dapat membocorkan informasi pribadi secara tidak sengaja atau dengan sengaja.

7. Pelacakan online yang tidak sah

Pengumpulan data pribadi seseorang melalui penggunaan cookie, pelacakan lokasi, atau metode lainnya tanpa izin atau pengetahuan individu yang terkena dampaknya.

Untuk melindungi diri dari modus operandi penyebaran data pribadi, individu harus tetap berhati-hati dengan informasi pribadi mereka dan selalu memastikan bahwa tindakan keamanan yang tepat diambil, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan otentikasi dua faktor, dan

memperbarui perangkat lunak keamanan secara teratur. Penting juga untuk memahami praktik privasi dari layanan atau situs web yang digunakan agar dapat meminimalkan risiko penyebaran data pribadi secara tidak sah.

Dilihat dari kasus yang beredar dikalangan masyarakat, modus operandi penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online terjadi karena sebelum mengajukan pinjaman, calon nasabah telah memberikan izin akses kepada aplikasi untuk mengakses segala isi dari dari *smartphone* yang mereka gunakan untuk mengajukan pinjaman online. Dan dari situlah aplikasi pinjaman online mendapatkan segala data yang terdapat didalam *smartphone* tersebut, mulai dari nomor telfon, isi dari galeri, dan akses penyimpanan data lain nya.

Ketika nasabah telat untuk melakukan pengembalian pinjaman dari tanggal yang sudah ditentukan, aplikasi pinjaman online akan melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara mengirim pesan atau menelfon nasabah tersebut dan juga melakukan penyebaran data ke nomor telfon yang telah nasabah kaitkan, selanjutnya aplikasi pinjaman online akan menyebarkan data diri nasabah dengan cara mengancam, dimana setelah penyebaran data diri reputasi nasabah akan rusak dikalangan nasabah tersebut.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi Nasabah

2.2.3. Perlindungan Data Pribadi Nasabah Menurut Undang-Undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi elektronik sangat penting bagi setiap orang. Bentuk keamanan yang diharapkan setiap orang adalah kerahasiaan informasi yang dijamin oleh penyelenggara transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan informasi elektronik pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu²⁹ :

“Data elektronik adalah satu atau lebih data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada teks, audio, gambar, peta, denah, foto, pertukaran data elektronik (*electronic data interchange/EDI*), dan *email*. , telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

²⁹ pasal 1 ayat (1) Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, untuk dapat menggunakan informasi pribadi seseorang, informasi tersebut harus diperoleh dari pemilik informasi elektronik tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016, Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2008, berbunyi³⁰ : “Kecuali peraturan perundang-undangan menentukan berbeda, penggunaan informasi tentang data pribadi seseorang di media elektronik harus berdasarkan persetujuan dari subjek data.”

Larangan mengolah data pribadi/data elektronik setiap orang tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016, Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2008, diatur sebagai berikut³¹:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya bertentangan dengan kesusilaan.
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi konten game.
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan/atau fitnah. .

³⁰ pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³¹ pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemerasan dan/atau ancaman. .

Mengenai sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang tersebut antara lain³² :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan dan/atau mentransmisikan dan/atau memberikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan isi permainan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .

³² pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).³³
- 4) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan pemerasan dan/atau ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2.2.4. Perlindungan Data Pribadi Nasabah Menurut Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

Data pribadi adalah suatu hal yang penting untuk dijaga kerahasiaannya dan kebenarannya, karena menyangkut dengan informasi setiap individu, dan perkembangan transaksi dibidang elektronik begitu pesat, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi dibidang sistem elektronik, pada peraturan Kementerian Komunikasi dan

³³ *Ibid*

Informatika ini terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, antara lain³⁴ :

A. Pasal 2 ayat (1) Peraturan KOMINFO nomor 20 Tahun 2016 :

“Perlindungan Data Pribadi pada bidang Elektronik meliputi perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.”

B. Pasal 8 Peraturan KOMINFO nomor 20 Tahun 2016 :

- a. Dalam mendapatkan, mengumpulkan Data Pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi.
- b. Menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadi yang bersifat privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari penyediaan pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap:
 - a) Kerahasiaan atau etidak rahasiaan Data Pribadi; dan
 - b) Perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi.

³⁴ Aditama, Novrizal Satrya. *implementasi perturan menteri kominfo nomor 20 tahun 2016 terhadap perlindungan data pribadi dalam sistem eletronik (Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

C. Pasal 26 Peraturan KOMINFO nomor 20 Tahun 2016 :

Pemilik Data Pribadi berhak Atas kerahasiaan Data Pribadinya yaitu³⁵ ;

- a. Mengajukan aduan dalam rangka penyelesaian masalah Data Pribadi atas kelalaian perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- b. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperoleh akses atau peluang untuk memperoleh isi Data Pribadinya yang pernah diberikan kepada pihak sistem elektronik selama masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menghimbau pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang diolah oleh Pemilik Sistem Elektronik, terkecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

³⁵ Hediati, Febri Noor. "Perlindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem Online di Era Perkembangan Finansial Teknologi: Protection of Credit Customer Data with Online Systems

2.2.5. Perlindungan Data Pribadi Nasabah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Peraturan No. 1/POJK.07/2013 OJK Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dalam Pasal 1 angka 2, dijelaskan mengenai pengertian konsumen yaitu³⁶; “Konsumen merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan layanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 OJK, Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang didapat oleh konsumen dalam cakupan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Perlindungan kerahasiaan data dan informasi konsumen adalah satu objek yang juga harus dilindungi oleh setiap PUJK atau OJK selaku pengawas sektor jasa keuangan.

Dalam peraturan pasal 2 POJK No.1/2013 tentang prinsip perlindungan konsumen sebagai berikut³⁷ :

³⁶ <https://www.ojk.go.id/id/>

³⁷ <https://www.ojk.go.id/id/>

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

berdasarkan Pasal 1 angka 1 No.20 Tahun 2016 Peraturan Kominfo tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menjelaskan bahwa data pribadi adalah³⁸. “Data pribadi merupakan data perseorangan yang disimpan, dipelihara, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.”

Dari interpretasi dan pemahaman data informasi konsumen, dapat disimpulkan bahwa data dan informasi konsumen adalah data milik setiap individu atau perusahaan yang menginvestasikan uang atau menggunakan jasa keuangan. . Data ini harus dijaga kerahasiaannya. atau angka yang menjadi penanda setiap orang pasti berbeda dari orang ke orang, data ini sangat privasi sehingga harus dijaga agar tidak ada yang menyalahgunakannya.³⁹

³⁸ pasal 1 angka 1 Peraturan Kominfo No.20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik

³⁹ Sofa ana,2018,Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam era bisnis *Fintech*, Jurnal Hukum & Pasar modal, Vol.VIII,No.16.Hal 6

Untuk menjamin perlindungan konsumen dalam hal keamanan data serta untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Peraturan OJK ini tentang kerahasiaan data dalam 26 POJK 77/POJK.01/2016 mewajibkan Pemasok untuk⁴⁰ :

- a. Menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data pribadi, transaksi dan keuangan yang dikelolanya sejak diperoleh sampai dengan pemusnahannya.
- b. Pastikan bahwa proses validasi, verifikasi, dan validasi tersedia yang mendukung non-penolakan dalam akses, pemrosesan, dan penegakan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Memastikan bahwa pengumpulan, penggunaan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data transaksi dan keuangan, kecuali diwajibkan lain oleh undang-undang dan regulasi;
- d. Menyediakan sarana komunikasi lain selain sistem layanan pinjam meminjam kripto berbasis IT untuk menjamin kesinambungan layanan nasabah, baik berupa email, call center, maupun sarana komunikasi lainnya; dan

⁴⁰ pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan PinjamMeminjam Uang Berbasis Tekhnologi Informasi.

- e. Memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi, Data Transaksi dan Data Keuangan apabila terjadi pelanggaran perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, Data Transaksi dan Data Keuangan tanpa dikelolanya.

Selain itu, juga telah diatur dalam Pasal 29 POJK 77/POJK.01/2016 tentang prinsip dasar perlindungan konsumen yang harus dipatuhi oleh penyelenggara antara lain:

- a. Transparan;
- b. Perlakuan adil;
- c. Keandalan;
- d. Privasi dan keamanan data; Dan
- e. Penyelesaian sengketa pengguna yang sederhana, cepat, dan terjangkau.

Selanjutnya, OJK juga menetapkan ketentuan terkait larangan penyelenggara menyebarluaskan data dan informasi konsumen layanan *financial technology* kepada pihak ketiga, hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/ 2016 tentang teknologi- Informasi tentang layanan pinjam meminjam uang berdasarkan:

Penyelenggara dilarang memberikan data dan/atau informasi tentang Pengguna kepada pihak ketiga dengan cara apapun. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap kewajiban dan larangan yang diatur

dalam POJK No. 77/POJK.01/2016, OJK berhak mengenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 47 POJK 77/2016, Selengkapnya⁴¹ :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang privasi dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen. Mengenai perlindungan kerahasiaan data dan informasi konsumen, diatur dalam Bab II yang berbunyi:

1. PUJK dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi tentang pelanggannya kepada pihak ketiga.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan dalam hal:
 - a. Konsumen mengsepakati persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Konsumen menyetujui secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 2 a, PUJK dapat memberikan Data Pribadi dan/atau Informasi Konsumen dengan kewajiban untuk memastikan bahwa pihak ketiga tersebut tidak menyediakan dan/atau menggunakan Data Pribadi

⁴¹ pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Konsumen. Data dan/atau Informasi untuk tujuan selain yang telah disepakati antara PUJK dan pihak ketiga.

4. Tata cara persetujuan tertulis dari Konsumen dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain:
 - a. pilihan setuju atau tidak setuju; atau
 - b. memberikan tanda persetujuan. dalam dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan.
5. Dalam hal PUJK memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan PUJK akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan usahanya, PUJK wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak lain yang terkait telah mendapat persetujuan tertulis dari orang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi tersebut kepada pihak manapun, termasuk PUJK .

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) mengatur bahwa individu, termasuk mereka yang melakukan aktivitas komersial atau e-commerce di rumah, dapat digolongkan sebagai orang yang menguasai data pribadi. Oleh karena itu, secara hukum bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi yang dimilikinya dan untuk mematuhi ketentuan undang-undang PDP. Abrijani menilai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PDP tentang frasa “kegiatan perseorangan” atau “kegiatan rumah tangga” bersifat kegiatan di bidang swasta yang bersifat

pribadi. nirlaba. -professional Pengecualian yang diatur dalam pasal ini merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia, yaitu terpeliharanya hak privasi seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Makna pengecualian dalam UU PDP adalah bagi individu yang merupakan individu yang mengolah data pribadi sepanjang untuk kegiatan keluarga yang tidak tergolong sebagai pengendali data pribadi. Dengan kata lain, individu tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban sebagai pengontrol data pribadi yang dituangkan dalam UU PDP. Disebut Abrijani saat sidang berlangsung. Data pribadi adalah hak yang harus dilindungi, dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). RUU Perlindungan Data Pribadi adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

RUU PDP terdiri dari 72 pasal dan 15 bab. Peraturan tersebut mengatur definisi data pribadi, jenis, kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengontrol dan pemroses, distribusi, organisasi resmi untuk pengelolaan data pribadi, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, RUU tersebut juga akan mengatur kerja sama internasional dan sanksi yang akan diterapkan dalam kasus penyalahgunaan data pribadi. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menandatangani RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada 24 Januari 2020.

2. Jenis-Jenis Data Pribadi yang Dilindungi

Kategori data pribadi dalam Bab II Pasal 3 Ayat (1) RUU PDP dibagi menjadi dua, yaitu data pribadi umum dan data pribadi khusus. Data pribadi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang digabungkan untuk mengidentifikasi seseorang.⁴²

Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, kecenderungan hidup/pendidikan status, pandangan politik, catatan kriminal, data anak, data keuangan pribadi dan/ atau data lain yang diwajibkan oleh hukum. Sanksi pidana atas pelanggaran penggunaan data pribadi

RUU PDP juga mengenakan sanksi atas pelanggaran data pribadi. Pelaku yang mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum akan dikenakan pidana penjara tujuh tahun atau denda maksimal Rp 70 miliar.⁴³

⁴² *Ibid*

⁴³ <https://indonesiabaik.id/infogratis/ruu-pdp-jenis-data-pribadi-yang-wajib-dilindungi>

2.3. Tinjauan Umum Tentang Financial Technology

2.3.1. Pengertian *Financial Technology*

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang berkembang sangat pesat berdampak pada industri jasa keuangan, salah satunya adalah inovasi dalam industri keuangan yaitu *Fintech*. *Fintech* berasal dari akronim *Financial Technology*, yang menurut *National Digital Research Center (NDRC) di Dublin, Irlandia*, berarti *fintech* adalah sebuah inovasi di bidang finansial atau keuangan, dimana inovasi tersebut disebabkan oleh terpaan teknologi modern. , atau memiliki definisi lain yaitu model bisnis, perusahaan memanfaatkan perkembangan teknologi yang aktivitasnya berpotensi tumbuh di industri keuangan⁴⁴.

Transaksi yang termasuk dalam layanan *Fintech* ini meliputi namun tidak terbatas pada pembayaran, investasi, pinjaman, transfer, perencanaan keuangan, dan perbandingan produk keuangan. dalam Pasal 1(3) Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Dana Berbasis Teknologi Informasi, menjelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Dana Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan keuangan yang bertujuan menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk masuk ke

⁴⁴ Kiko Sarwin.(Et.al).2017.Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:Perlindungan Konsumen pada *Fintech*, Jakarta.Departemen perlindungan konsumen Jakarta. hal 8

dalam rupiah perjanjian pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet⁴⁵.

Bank Indonesia menggambarkan *fintech* sebagai fenomena yang menggabungkan fitur teknologi dan keuangan yang mengubah model bisnis dan menurunkan hambatan masuk⁴⁶. Perkembangan *Fintech* menurutnya telah memberikan dampak transformatif di industri keuangan antara lain:

1. Model bisnis telah berubah, artinya sektor keuangan sebelum *Fintech* mengutamakan proses langsung, dengan *Fintech*, model bisnis telah berubah dengan transaksi sistem online menggunakan Internet.
2. Mengurangi hambatan masuk (*Barrier to Entry*) di perusahaan bagi agen komersial yang tidak patuh terhadap regulasi, dengan adanya *Fintech* ini membuat pelaku ekonomi patuh terhadap regulasi, karena regulasi pengelolaan *Fintech* lebih fleksibel.

Dari uraian konsep *financial technology* di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi saat ini membuat transaksi di bidang keuangan menjadi sangat mudah, konsumen tidak perlu lagi ke lembaga keuangan untuk bertransaksi, sehingga kehadiran *Fintech* pun mengubah hal yang biasa. Pola masyarakat dalam menggunakan jasa industri keuangan, keadaan ini akhirnya membawa kembali perubahan bagi para

⁴⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁶ Ilman Abdul H.(et.al).2019.*Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang*.Sumbawa.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.Vol.04 No.1.Fakultas Ekonomi dan Bisnis.UTS.Hal 29

pengusaha, mereka berkeinginan melakukan perubahan sistem layanan dengan mengembangkan layanannya berupa *mobile phone* atau *website*.

Dalam perkembangan *Fintech* terdapat berbagai jenis, inovasi industri keuangan ini dapat disebut sebagai jasa keuangan yang mengadopsi teknologi modern, jenis-jenis *Fintech* antara lain⁴⁷:

1. Manajemen Aset

Manajemen aset diatur untuk membantu meringankan tugas-tugas bisnis, misalnya dalam hal distribusi gaji, kebutuhan operasional bisnis, sistem keuangan, dll. Menyadari bahwa teknologi berkembang dan inovasi diperlukan, banyak startup menganggapnya sebagai bisnis, salah satunya adalah *jojonomic*, perusahaan *Fintech* legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ikut serta dalam manajemen aset.

2. *Crowd Funding*

Crowdfunding biasa dikenal sebagai platform yang menyelenggarakan penggalangan dana, amal dan kegiatan sosial lainnya, yang hasilnya akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan seperti korban bencana alam, bencana alam, kecelakaan, dll. Penggalangan dana ini dilakukan dengan menggunakan sistem online, saat ini contoh *Fintech Crowd Funding* yang banyak dikenal masyarakat adalah *Kitabisa.com*. Platform ini digunakan untuk

⁴⁷ Dunia*Fintech*, Apa itu *Fintech* <https://www.duniafintech.com/apa-itu-fintech/>

membantu orang lain yang membutuhkan dengan cepat, aman, efisien dan lancar.⁴⁸

3. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency biasa dikenal dengan dompet digital, konsep *cryptocurrency* adalah penggunaan aplikasi yang dapat digunakan untuk menyimpan uang dan kemudian melalui aplikasi ini transaksi dapat dilakukan seperti membayar tagihan, melakukan pembelian hanya dengan satu aplikasi, tentunya aplikasi ini dapat digunakan jika ada uang di dalamnya, setiap aplikasi memiliki aturannya sendiri tentang saldo minimum yang harus ada di aplikasinya .⁴⁹

4. Asuransi

Asuransi yang termasuk dalam *Fintech* jenis ini berbeda dengan layanan asuransi konvensional yang banyak dikenal selama ini, jika asuransi konvensional mewajibkan tertanggung untuk membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan dukungan serupa masa depan tertanggung jika mengalami kerugian akibat ke kondisi yang merugikan. peristiwa. peristiwa. Namun *fintech* asuransi tidak menyediakan layanan tersebut, dalam bisnis asuransi ini peserta memberikan informasi tentang rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, rujukan rumah sakit dan hal-hal terkait lainnya hingga informasi kesehatan.⁵⁰

⁴⁸ DuniaFintech, Apa itu *Fintech* <https://www.duniafintech.com/apa-itu-fintech/>

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ DuniaFintech, Apa itu *Fintech* <https://www.duniafintech.com/apa-itu-fintech/>

5. *Payment Gateway*

Tumbuhnya *e-commerce* dan toko online di Indonesia menuntut startup untuk berperan sebagai penghubung antara pelaku bisnis dan pelanggan. *Payment gateway* ini digunakan untuk bertindak sebagai perantara antara toko online dengan pelanggan dalam hal pembayaran digital, dengan mengisi nominal pada akun pemilik platform, pembayaran dapat dilakukan secara instan, efek dari startup ini adalah memudahkan pembayaran transaksi, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi agen pedagang.⁵¹

6. *Remittance*

Transfer uang dapat dipahami sebagai platform yang menyediakan layanan pengiriman uang ke luar negeri, tujuan didirikannya *startup* jenis ini adalah untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, keberadaan *startup* jenis ini sangat memudahkan para pekerja migran atau siapapun yang memiliki keluarga di luar negeri, atau mau kirim ke luar negeri, karena prosesnya mudah dan biayanya lebih murah.⁵²

7. *Securities*

Jenis investasi yang sering kita dengar antara lain saham, reksa dana, dan lainnya. *Startup* ini menyediakan jual beli reksa dana online, alat investasi saham, reksa dana, dan lainnya.⁵³

⁵¹ Ibid

⁵² DuniaFintech, Apa itu Fintech <https://www.duniafintech.com/apa-itu-fintech/>

⁵³ Ibid

8. *Peer to Peer Lending (P2P)*

Peer to Peer Lending adalah sebuah platform penyedia layanan pinjaman online, tujuan dari platform ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal permodalan, karena permodalan dianggap sebagai hal yang paling penting ketika memulai atau mengembangkan usaha. .

Startup ini menawarkan kemudahan bagi masyarakat yang kesulitan keuangan, yang membutuhkan uang alternatif cukup mengunduh aplikasinya melalui *smartphone* dan proses pencairan yang disediakan cukup cepat. Keunggulan P2P lending adalah prosesnya lebih cepat, tanpa agunan, dan syarat pengajuannya tidak serumit mengajukan pinjaman dari bank biasa. Proses pinjaman hanya dapat diakses melalui *smartphone*, seperti *Apple store* {IOS} atau *Google play store* {Android}, atau laptop dengan koneksi internet.⁵⁴

2.3.2. Pengertian *Peer to peer lending*

Saat ini, dengan berkembangnya teknologi dan sistem informasi, industri keuangan juga mengalami perubahan. Sebelumnya, transaksi pinjam meminjam harus dilakukan secara langsung atau tatap muka, dengan jaminan yang dilampirkan. Inovasi baru bagi industri keuangan adalah

⁵⁴ DuniaFintech, Apa itu Fintech <https://www.duniafintech.com/apa-itu-fintech/>

kemudahan proses pinjam meminjam dimana transaksi dilakukan secara online dan tanpa agunan serta proses pencairan yang cepat.

Peer-to-peer lending adalah layanan pinjam meminjam langsung berbasis teknologi informasi antara pemberi pinjaman dan penerima, dimana mediator membangun, menyediakan, dan mengoperasikan sistem elektronik untuk menghubungkan langsung kontak pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) tanpa harus bertatap muka. -untuk menghadapi. Layanan pinjam meminjam online memberikan keuntungan yang besar karena masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan secara online tanpa harus saling mengenal terlebih dahulu tanpa harus memberikan jaminan.

Dalam layanan *peer-to-peer*, memungkinkan orang untuk bertindak sebagai pemberi pinjaman (*investor*) atau meminta pinjaman dari lembaga tanpa menggunakan lembaga jasa keuangan konvensional sebagai perantara. kegiatan peminjaman .⁵⁵

Penyedia layanan *peer-to-peer* wajib menyediakan platform atau situs *web*, dan penyedia bertanggung jawab untuk membuat dan menyediakan platform ini untuk menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (penerima pinjaman) langsung melalui sistem online tanpa harus bertemu langsung. konfrontasi. .

⁵⁵ Walter P. *Apa Itu Peer to Peer Lending (P2P Lending)*, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>.

Penyedia layanan *peer-to-peer* juga wajib mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan, setelah itu Otoritas Jasa Keuangan akan menyetujui pendaftaran penyelenggara dengan memberikan sertifikat pendaftaran. Dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dijelaskan bahwa penyelenggara yang telah terdaftar di OJK wajib mengajukan izin sebagai tuan rumah yang diselenggarakan paling lama satu tahun. tahun. karena statusnya terdaftar di OJK. Permohonan izin akan dipantau oleh OJK paling lambat 20 hari kerja setelah dokumen permohonan izin diterima oleh otoritas jasa keuangan, keputusan OJK terhadap permohonan izin, antara lain keputusan OJK, diterima atau ditolak. ⁵⁶

Penyedia jasa *peer-to-peer lending* berperan penting dalam industri keuangan karena perusahaan pelaksana perlu membangun dan mengoperasikan sistem atau platform elektronik yang dapat menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pinjaman tanpa harus bertatap muka, yaitu penyelenggara melakukan layanan perantara untuk memfasilitasi transaksi pinjam meminjam secara online.

Penyelenggara merupakan pihak dalam layanan *peer-to-peer lending*, sehingga memiliki hak dan kewajiban sebagai bagian dari fungsinya. Adapun kewajiban penyedia dalam layanan *peer-to-peer lending* antara lain ⁵⁷:

⁵⁶ Walter P. *Apa Itu Peer to Peer Lending (P2P Lending)*, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>.

⁵⁷ Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Fintech*, Op.Cit, Hal 31

1. Penyedia wajib memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan tentang *peer-to-peer lending* kepada konsumen layanan pinjaman online.
2. Penyedia pinjaman *Fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan aktivitasnya harus mematuhi peraturan yang berlaku, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan.
3. *Fintech lending* yang terdaftar di OJK harus mengutamakan aspek perlindungan konsumen, salah satunya terkait perlindungan data dan informasi konsumen, dimana penyelenggara hanya diperbolehkan mengakses data konsumen bukan sebagai snack (kamera, *microphone*, lokasi) .
4. Dalam hal metode pengisian, operator *Fintech* harus menggunakan pemungut tol yang disetujui atau terdaftar oleh OJK yang diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi pemungut tol yang didanai bersama oleh Asosiasi Perusahaan Keuangan Indonesia (AFPI) yang dilakukan.
5. Pemasok yang terdaftar di OJK wajib menyediakan sarana pengaduan kepada pelanggan dan wajib menelusuri pengaduan serta melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada OJK. .
6. Penyelenggara harus memiliki kantor yang berlokasi di area terbuka, disurvei OJK dan mudah ditemukan di Google .

Sementara hak penyedia jasa pinjam meminjam dengan teknologi informasi antara lain :

1. Penyelenggara berhak menerima pembayaran beserta tingkat bunga yang disepakati dari penerima pinjaman sehubungan dengan pelunasan pinjaman.
2. Mendapatkan komisi 5% atas layanan yang diberikannya yaitu membuat platform untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung tanpa harus bertatap muka.

2.3.3. Regulasi *Financial Technology* di Indonesia

Fintech adalah inovasi yang membawa perubahan besar pada industri keuangan. Karena transaksinya melibatkan campur tangan teknologi modern, tentunya akan ada regulasi yang mengatur layanan *financial technology* ini agar pengoperasiannya aman dan memiliki kepastian hukum, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur layanan *Fintech* ini.⁵⁸ Otoritas Perbankan dan Jasa Keuangan Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang *Fintech*, keduanya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Sesuai surat edaran OJK bulan Maret 2023 (terlampir).

⁵⁸ <https://www.ojk.go.id/id/>

2.4. Aspek Perjanjian Online Berbasis Teknologi

Dasar perjanjian P2P lending di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa penyedia layanan pinjam meminjam online wajib mendaftar dan menerbitkan otorisasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penyedia pinjaman online ini juga berdasarkan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga akan berbentuk badan hukum berbentuk badan hukum perseroan terbatas. (PT) atau koperasi. Dapat dipahami bahwa penyedia pinjaman online yang tidak terdaftar dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak berbentuk PT atau koperasi dapat dianggap sebagai pinjaman online ilegal Perancis.⁵⁹

⁵⁹ peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁶⁰ Selain itu sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum ini dapat dipelajari dengan dua cara, yaitu:

- 1) Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan
- 2) Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.⁶¹

Pendekatan sosiologi hukum pada dasarnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologis tentang hukum. Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan hukum positif dan bisa

⁶⁰ *Ibid*, h. 23

⁶¹ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 65

pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.⁶²

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka dilakukan penelitian ini di wilayah Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan ada beberapa korban dari tindak modus operandi penyebaran data pribadi, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut. Karena di Desa Pematang Tebih sangat minim pengetahuan tentang apa saja bahaya dari transaksi pinjaman online. Dan hal ini yang menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai apa tentang tinjauan yuridis terhadap perlindungan data nasabah pinjaman online.

3.3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi data lapangan yakni informan sebagai sumber data primer dan dokumen kepustakaan sebagai data sekunder. Data lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lapangan dengan cara wawancara langsung dengan para informan yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Sedangkan data dokumen kepustakaan

⁶² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 51

yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat oleh penulis.⁶³

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang meliputi:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh penulis sebatas yang diketahuinya dan penulis tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Seorang informan adalah sumber data yang merupakan bagian dari unit analisis. Kebenaran informasi yang diberikan oleh narasumber adalah kebenaran menurut narasumber tersebut, bukan dari penulis.⁶⁴ Jumlah narasumber ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih orang-orang tertentu oleh penulis berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah inisial (DU) laki-laki umur 23 tahun bekerja sebagai karyawan swasta yang bergerak dibidang penyediaan barang. Selanjutnya yang menjadi narasumber adalah inisial (BS) laki-laki umur 25 tahun bekerja sebagai petani kebun sawit. Kemudian yang menjadi narasumber adalah inisial (IW) perempuan umur 35 tahun sebagai pedagang dan

⁶³ 22 Mei 2023

⁶⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian.....*, h. 175

pemilik toko busana. Jadi ada 3 orang yang akan penulis jadikan narasumber dalam penelitian ini.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah ilmiah hukum, pendapat para sarjana maupun artikel atau majalah hukum. Dalam hal ini mengenai Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dsb.⁶⁵

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu panduan yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut dapat terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi terkait masalah yang akan diteliti.
2. Observasi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan langsung

⁶⁵ Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 175

terhadap subjek penelitian. Dengan observasi dapat mengumpulkan data secara lebih cermat, detail dan terperinci.

3. Studi dokumentasi, yaitu data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat perjanjian dan lainnya yang dapat digunakan sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁶⁶ Populasi adalah kumpulan atau sekumpulan objek yang memiliki kesamaan karakteristik.⁶⁷ Jadi populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah Pinjaman Online
- 2) Akademis Fakultas Hukum Universitas Pasis Pengaraian

Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan kumpulan atau sebagian kumpulan dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan dari populasi penelitian.⁶⁸ Metode sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 172

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005, hal. 118

⁶⁸ *Ibid*, hal. 119

purposive sampling yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili dari jumlah populasi yang ada dan kategorinya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk memperjelas mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel II Populasi
dan Sampel**

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Nasabah Pinjaman Online	4	1
2	Akademis	13	1
	Jumlah	17	2

sumber: Data Diolah Oleh Penulis Pada Tahun 2023

3.6. Analisis Data

Setelah melalui proses dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Yang nantinya akan memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh dari catatan lapangan, naskah wawancara, foto dan dokumen penting lainnya untuk memberi gambaran terhadap penyajian laporan tersebut.

Tujuan utama dari deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Didalamnya ada upaya mencatat, mendeskripsikan, menganalisis dan menafsirkan atau menginterpretasikan kondisi yang terjadi saat ini, guna memperoleh informasi yang masih berlaku mengenai keadaan

masyarakat. Kemudian setelah data dan informasi dianalisis, data dirumuskan dalam kesimpulan secara deduktif.